

0.1  
**KERANGKA PRASARANA KTIN**

- KONDISI SAAT INI**
1. Duplikasi data karena tidak adanya standar, koordinasi dan resource sharing dalam pemanfaatan data
  2. Interoperabilitas sistem yang rendah (tidak ada integrasi sistem) karena perbedaan platform sistem baik dalam organisasi maupun antar organisasi
  3. Prasarana telekomunikasi yang belum memadai : cakupan, bandwidth, tarif
  4. Kuantitas & kualitas SDM TI yang rendah serta reward yang kurang memadai bagi SDM TI di pemerintahan
  5. Optimalisasi sistem yang rendah karena tidak ada evaluasi investasi : keuangan, kebutuhan & fungsionalitas
  6. Dukungan akses informasi bagi masyarakat yang masih rendah

- KEBIJAKAN UMUM**
1. Melibatkan masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana
  2. Dukungan pemerintah berupa insentif dan regulasi
  3. Mempromosikan persaingan bebas untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas layanan
  4. Menjamin keterbukaan akses yang universal bagi masyarakat
  5. Melakukan evaluasi bagi pengembangan infrastruktur secara rasional
  6. Melakukan pengajian terbukanya backbone jaringan infrastruktur nasional
  7. Melakukan evaluasi dan memberikan skala prioritas keberataan infrastruktur
  8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pelatihan dan pemberian sertifikasi
  9. Mendorong pertumbuhan industri TI lokal melalui kerjasama industri TI luar negeri

- PRINSIP DASAR**
1. Standar, untuk mendukung interoperabilitas TI antar organisasi
  2. Keamanan, untuk menghindari akses ilegal dan menjaga keahliasaan, keabsahan dan integritas data.
  3. Pengumpulan Data/Informasi, untuk mengurangi usaha dalam pengumpulan data
  4. Akses Informasi, untuk menyediakan sarana agar informasi dapat diakses dengan mudah
  5. Pemilihan Teknologi, untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna

0.2  
**KERANGKA HUKUM KTN**

**KONDISI SAAT INI**

1. Belum adanya aturan mengenai pengelolaan keuangan negara khususnya dalam bidang TI sehingga mengakibatkan unit-unit TI khususnya di sektor pemerintah sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah
2. Belum adanya struktur dan status yang jelas dari unit TI khususnya di sektor pemerintah sehingga unit TI tersebut tidak dapat mandiri dalam melaksanakan tugasnya.
3. Belum adanya regulasi yang mengatur perdagangan elektronik: transaksi & keamanan
2. Kurang memadainya aturan mengenai informasi apa saja yang dapat di-share dengan organisasi lain dan informasi apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Regulasi di bidang telekomunikasi yang masih bersifat monopoli
4. Kurang memadainya hukum yang mengatur perlindungan information privacy & computer crime
5. Rendahnya awareness masyarakat untuk mengharga hak cipta produk TI (penggunaan produk bajakan)

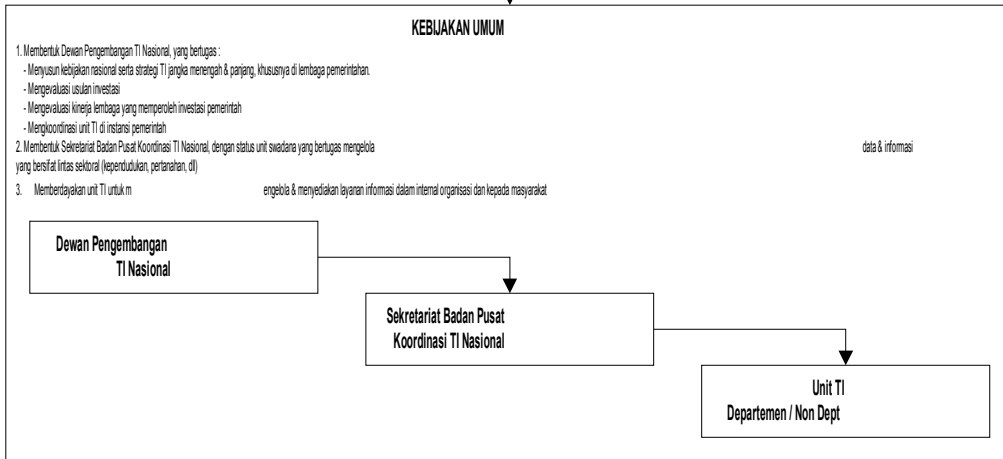
**KEBIJAKAN UMUM**

1. Membenahi pengelolaan keuangan negara, dengan cara:
  - Menubah status unit TI di sektor pemerintah menjadi unit swadana sehingga berwenang untuk menerima pendapatan sendiri
  - Merampingkan struktur unit TI di sektor pemerintah dan outsource layanan ke UPT Layanan Informasi
2. Membentuk unit organisasi TI berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Informasi yang memiliki status Badan Hukum Milik Negara
3. Meratifikasi Hukum Telematika, yang mengatur: kerahasiaan & perlindungan data; transaksi secara elektronik; kejahatan komputer, media, telekomunikasi & penyebaran; konflik antar tata hukum; dan pembukuan data elektronik

0.3  
**KERANGKA ORGANISASI KTIN**

**KONDISI SAAT INI**

1. Belum adanya organisasi yang mengatur kebijakan, koordinasi, perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi di bidang TI dalam skala nasional, sehingga pengembangan TI menjadi tersegmentasi (tidak terintegrasi)
2. Konsep-konsep TI skala nasional (Nusantara 21, Telematika) yang telah disusun kurang bisa berjalan karena kurangnya koordinasi
3. Kurangnya pembudayaan unit TI di organisasi sehingga unit TI hanya berlaku sebagai cost center dan tidak mampu menjadi profit center



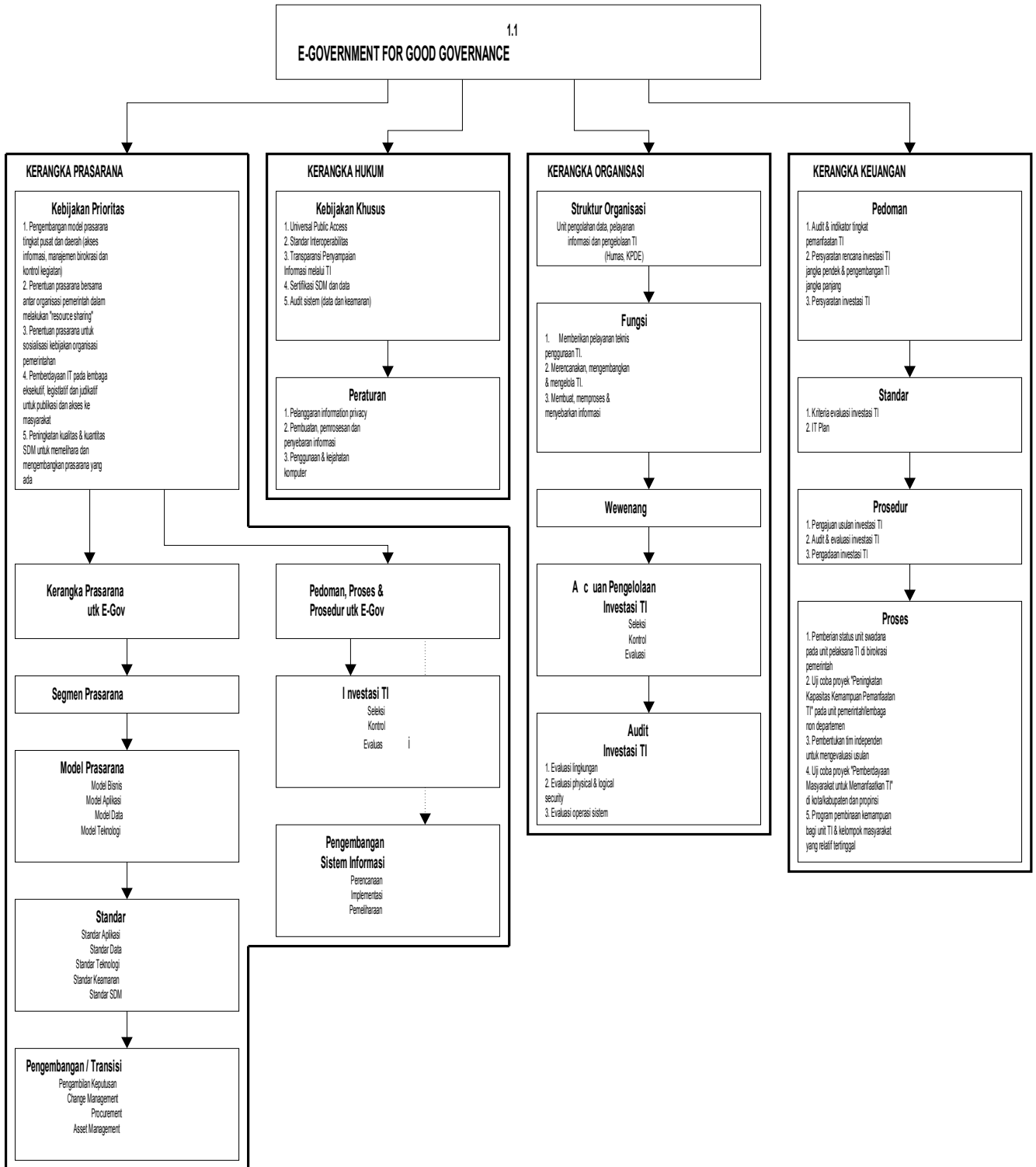
0.4  
**KERANGKA KEUANGAN KTIN**

**KONDISI SAAT INI**

1. Rendahnya persentase untuk anggaran TI dari anggaran organisasi yang tersedia sehingga menyebabkan kurangnya dukungan TI terhadap operasional organisasi (pengadaan, pemeliharaan & pelatihan)
2. Tidak adanya cost benefit analysis dan justifikasi investasi terhadap usulan investasi TI
3. Rendahnya kemampuan unit TI dalam mengalang dana untuk pengembangan TI sehingga tidak memiliki sense of belonging terhadap TI yang ada.

**KEBIJAKAN UMUM**

1. Menerapkan mekanisme pendanaan yang partisipatif
2. Menyusun perencanaan strategis untuk investasi TI
3. Menyediakan paket pendanaan yang bersifat kontrak untuk investasi TI
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengalang dana pendamping
5. Menerapkan kompetisi berlepas untuk pengajuan investasi
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan yang kredibel terhadap investasi TI
7. Menerapkan transparansi dalam penggunaan dana investasi
8. Menyediakan hibah dana pendamping untuk pembinaan TI dalam masyarakat
9. Mendukung pengalangan dana untuk pemeliharaan pasca implementasi



1.2  
**E-BUSINESS FOR  
SMALL & MEDIUM ENTERPRISE**

